

PERAN KETUA RT DALAM MENERAPKAN “NILAI SUMARAH DAN NGRENGKUH” DI TENGAH MENINGKATNYA PEMBANGUNAN (Studi Di RT 02 RW 23 Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta)

Mushilatus Sholihah dan V. Indah Sri Pinasti
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Karangmalang Yogyakarta Telp. (0274) 548202, 586168
Email: Mushilatussholihah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ketua RT dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” di tengah meningkatnya pembangunan (studi di RT 02 RW 23 Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta). Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran ketua RT dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” di tengah meningkatnya pembangunan (studi di RT 02 RW 23 Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian ini adalah: (1) kepala dukuh Ngropoh, ketua RW 23 Ngropoh, ketua RT 01 dan RT 02 Ngropoh, kaum RW 23 Ngropoh, tokoh masyarakat dari kelompok ibu-ibu, kelompok bapak-bapak, dan kelompok pemuda. (2) warga lokal Ngropoh dan warga pendatang yang bersifat menetap dan kos di daerah Ngropoh. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, ketua RT 02 RW 23 Ngropoh melaksanakan lima peran tokoh masyarakat dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” yakni: berperan sebagai *stabilitator*, *inovator*, *modernisator*, *pelopor*, dan pelaksana sendiri. *Kedua*, faktor pendukung peran ketua RT dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” yakni: solidaritas yang tinggi, partisipasi masyarakat, warga pendatang yang langsung bisa berbaur, antusias mayoritas warga dalam setiap agenda dan warga pendatang yang menaati norma serta patuh kepada pemimpin. Sedangkan faktor penghambatnya yakni: pembangunan yang semakin meningkat, perubahan bentuk partisipasi masyarakat, rasa nasionalisme yang masih kurang, adanya kost bulanan, kesibukan dan kesadaran warga yang bermacam-macam, belum adanya penghubung kepada warga pendatang, dan hujan.

Kata Kunci: *nilai sumarah dan ngrengkuh, peran ketua RT, faktor pendukung dan faktor penghambat.*

**THE ROLE CHAIRMAN OF RT IN APPLYING "VALUE SUMARAH AND
NGRENGKUH" IN THE MIDDLE OF INCREASED
(Studies in RT 02 RW 23 Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta)**

ABSTRACT

This research aims to determine the role of community leaders in the village to apply "value sumarah and ngrengkuh" amid increasing development (studies in RT 02 RW 23 Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta). Moreover, the purpose of this study is to determine the supporting and obstacle factor in village community leaders for implementing the "value sumarah and ngrengkuh" amid increasing development (studies in RT 02 RW 23 Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta). This research used a qualitative approach. Purposive sampling technique is used to determine the subjects in this study. The subjects in this study are: (1) public figures Dusun Ngropoh covering the head hamlet Ngropoh, RW 23 Ngropoh, chairman of RT 01 and RT 02 Ngropoh, the RW 23 Ngropoh, a community leader from a group of mothers, a group of fathers, and youth groups. (2) Ngropoh local residents and migrants who are settled and boarding houses in the area Ngropoh. The data collecting technique in this study is using interviews, observations and documentations. The results show that firstly, Ngropoh community leaders, especially heads of RT 02 RW 23 Ngropoh implement the five roles of community leaders in implementing the "value Sumarah and ngrengkuh" namely: acts as a stabilizer, an innovator, Modernisator, pioneers and implementers themselves. Second, the factors supporting the role of community leaders in implementing the "value Sumarah and ngrengkuh" namely: solidarity, community participation, the immigrant population is directly able to mingle, enthusiastic majority of citizens in each agenda and migrants who obey the norm and obedient to the leader. While the inhibiting factors namely: development increases, changes in the form of community participation, the sense of nationalism that is still lacking, their monthly boarding, bustle and citizen awareness are manifold, yet their liaison to the immigrant population, and rain.

Keywords: Sumarah and ngrengkuh value, the role chairman of RT, supporting factors and inhibiting factors.

PENDAHULUAN

Ngropoh merupakan salah satu dusun yang terdapat di Padukuhan Ngropoh yang merupakan salah satu padukuhan di Desa Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Di Dusun Ngropoh terdapat dua RT yakni RT 01 dan RT 02. Ngropoh dapat dikategorikan sebagai daerah pinggiran kota karena terjadi pertumbuhan sub-urban dan penataan lahan yang bercampur antara keperluan rural dengan keperluan urban, sehingga terbentuklah suatu daerah peralihan antara perkotaan dan pedesaan. Beesly (dalam Subroto, 1997 dalam Prihanto, 2010: 134) menyebutkan empat karakter yang dipakai untuk mengklasifikasikan suatu daerah dapat disebut sebagai *urban fringe*. Salah satu cirinya yakni suatu wilayah yang sebelumnya merupakan daerah pedesaan dengan dominasi untuk lahan pertanian, komunitas masyarakat pedesaan yang menjadi sasaran serbuan perkembangan kota dan menjadi ajang spekulasi tanah bagi para pengembang.

Letak Dusun Ngropoh yang strategis dan berdekatan dengan berbagai instansi yang menjanjikan fasilitas yang memadai dan mempermudah bagi terpenuhinya semua kebutuhan, seperti kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, perumahan dan berbagai kebutuhan lainnya menambah daya tarik para penduduk pendatang untuk tinggal di Dusun Ngropoh ini. Beratha (1982: 65) menyebutkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu yaitu

perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya.

Penduduk pendatang dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya memberikan nuansa baru bagi kehidupan sosial dan budaya penduduk lokal. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang dengan berbagai latar belakang yang berbeda tersebut menjadi ancaman tersendiri timbulnya akulturasi budaya yang dikhawatirkan dapat menggeser nilai kearifan lokal khususnya di Dusun Ngropoh yang berupa nilai kearifan *sumarah* (pasrah) dan *ngrengkuh* (merangkul). Kearifan atau *wisdom* dapat dianalisis sebagai solusi mengatasi dinamika masyarakat pluralitas yang tinggi; kearifan ditunjukkan dalam wujud memberikan karakter yang terpuji seperti halnya nilai pasrah dalam arti pasrah yang positif yakni mau menerima warga pendatang baru dengan beragam kebudayaan yang berbeda dan mau merangkul (*sumarah* dan *ngrengkuh*), tidak mengumbar janji, tidak mementingkan diri atau kelompok, memberikan keteladanan, serta menerapkan pola kehidupan yang beriman dan bertakwa (Sumaryadi, 2013: 203-204).

Budaya masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong dan bekerja sama akan hilang jika terjadi ketimpangan jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan jumlahnya terlalu padat sehingga akan membuat persaingan yang sangat ketat dan menyebabkan penduduk menjadi lebih individualis. Disisi lain, daerah yang penduduknya sedikit atau kurang akan kehilangan budaya asli

mereka karena tidak ada lagi yang mau melestarikan budaya tersebut. Penelitian ini bermaksud mencari tahu dan menggali informasi lebih lanjut mengenai jenis dan contoh nyata peran dari ketua RT dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” di tengah meningkatnya pembangunan khususnya di RT 02 RW 23 Ngropoh.

Friedman (1998: 286 dalam Firana, 2014: 13) menyatakan bahwa peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2005: 142-150 dalam Banar, 2014: 10-12) yaitu memainkan peranan selaku stabilitator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

Menurut Somadisastra (dalam Sumintarsih, et. al., 1992: 52-63 dalam Febriana, 2013) ada tiga kepemimpinan yang lahir atas dasar jalur kekuasaan formal dalam pemerintahan yaitu: kepemimpinan formal, kepemimpinan formal tradisional, kepemimpinan di luar kepemimpinan formal, dan kepemimpinan formal tradisional. Dalam hal ini, ketua RT termasuk dalam kategori kepemimpinan formal.

Segala upaya selalu dilakukan guna tercapainya suatu harapan kehidupan yang damai, sejahtera, dan peningkatan kualitas SDA dan SDM yang lebih baik, khususnya di RT 02 RW 23 Ngropoh. Ketua RT 02 dalam hal ini berperan penting dalam pencapaian harapan tersebut melalui peran nyata dari ketua RT 02 guna

menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” di tengah meningkatnya pembangunan. Namun demikian, suatu peran yang dilakukan oleh ketua RT 02 tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, baik lokal maupun pendatang. Partisipasi masyarakat terhadap peran pemerintah atau dalam hal ini adalah ketua RT 02 Ngropoh ada kalanya mendominasi kepada aspek positif. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan justru partisipasi masyarakat yang negatif pada akhirnya akan menjadi kendala atau bahkan menjadi faktor penghambat peran tersebut

LANDASAN TEORI

Kajian Teori

1. Pinggiran Kota, Pembangunan Dan Persebaran Penduduk

Beesly (dalam Subroto, 1997 dalam Prihanto, 2010: 134) menyebutkan empat karakter yang dipakai untuk mengklasifikasikan suatu daerah dapat disebut sebagai *urban fringe*, yaitu:

- a. Sebelumnya merupakan daerah pedesaan dengan dominasi untuk lahan pertanian dan komunitas masyarakat pedesaan.
- b. Merupakan daerah yang menjadi sasaran serbuan perkembangan kota serta menjadi ajang spekulasi tanah bagi para pengembang.
- c. Merupakan daerah yang diinvasi oleh penduduk perkotaan dengan karakter sosial perkotaan.
- d. Merupakan daerah dimana berbagai konflik muncul, terutama antara penduduk pendatang dan lokal, antara penduduk kota dan desa, dan antara petani dan pengembang (*developer*).

Kurniawan (2012: 230) menyatakan bahwa pembicaraan mengenai pembangunan selalu berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Lebih tajam lagi, pembangunan selalu ditahbiskan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

Silalahi (1985: 569-570) menyebutkan bahwa sejak tahun 1969 pemerintah telah melancarkan pembangunan dalam segala bidang kehidupan negara dan masyarakat. Data-data tentang pelaksanaan pembangunan nasional menunjukkan bahwa seluruh bidang kehidupan negara dan masyarakat cenderung semakin meningkat. Peningkatan itu menunjukkan bahwa pembangunan nasional telah membuka berbagai peluang nyata bagi kehidupan yang lebih baik, sehingga merangsang sejumlah penduduk untuk melakukan mobilitas, baik mobilitas horisontal maupun vertikal juga merangsang ketidaksamaan pertumbuhan daerah-daerah dan bidang-bidang kehidupan masyarakat. Ketidaksamaan pertumbuhan ini juga merangsang faktor yang merangsang terjadinya mobilitas penduduk, yaitu mengalirnya sejumlah tenaga kerja ke bidang-bidang kehidupan yang lebih maju dan mengakibatkan terjadinya perpindahan penduduk ke daerah-daerah yang berkembang lebih pesat. Mobilitas penduduk bermacam-macam bentuknya, yaitu urbanisasi, transmigrasi, perpindahan penduduk ke negara-

negara lain, dan kembali lagi ke desa-desa asalnya. Dalam perpindahan penduduk itu, ada perpindahan dari tempat asalnya untuk selama-lamanya, atau yang lebih dikenal dengan istilah migrasi selama hidup atau *life time migration*. Perpindahan penduduk yang berlangsung hanya untuk sementara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sirkulasi; dan ada penduduk yang bekerja diluar desa atau kotanya, tetapi mereka kembali lagi pada hari itu juga, atau yang lebih dikenal dengan istilah *penglaju* (Silalahi, 1985: 570).

2. Pendatang, Nilai Kearifan Lokal “Sumarah dan Ngrengkuh” dan Akulturasi

Prihanto (2010: 139) menyatakan bahwa pada dasarnya, penduduk asli telah memiliki aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi oleh para pendatang dan bersifat mengikat, sehingga para pendatang harus menyesuaikan dengan aturan-aturan tersebut. Meski telah mengalami penyesuaian, pendatang tetap membawa latar belakang sosial budaya sendiri sehingga meskipun sedikit tetap memberikan pengaruh bagi penduduk setempat.

Kearifan atau *wisdom* dapat dianalisis sebagai solusi mengatasi dinamika masyarakat pluralitas yang tinggi; kearifan ditunjukkan dalam wujud memberikan karakter yang terpuji seperti halnya bersifat pasrah dan merangkul (*sumarah* dan *ngrengkuh*) seluruh warga, tidak mengumbar janji, tidak mementingkan diri atau kelompok, memberikan keteladanan, serta

menerapkan pola kehidupan yang beriman dan bertakwa (Sumaryadi, 2013: 203-204).

Purwadi (2006: 323) menyebutkan bahwa istilah *sumarah* dapat diartikan dengan istilah pasrah menyerah. Menurut Arymurthy, et. al. (1989: 1) *sumarah* menunjukkan kepada tingkat kesadaran yang memberi jalan bagi manusia untuk berserah diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, peneliti mencoba menafsirkan dengan menggunakan bahasa sosial yang juga kerap digunakan oleh warga setempat khususnya RT 02 RW 23 Ngropoh yang mengartikan *sumarah* dalam kehidupan sosial dengan arti pasrah yang positif yakni pasrah dalam arti menerima warga pendatang yang mau bergabung dan bersatu dengan warga lokal Ngropoh. Jadi, dalam hal ini nilai *sumarah* dapat diartikan dengan suatu nilai yang berupa sikap pasrah yang positif atau pasrah untuk menerima pendatang baru dengan baik yang diterapkan dan ditanamkan di RT 02 RW 23 Ngropoh yang dalam hal ini kajian lebih dalamnya akan ditujukan kepada peran ketua RT dalam menerapkan nilai tersebut. Sedangkan makna *rengkuh* sendiri dalam Purwadi (2006: 292) adalah rangkul. Peneliti dalam hal ini mencoba menafsirkan secara universal bahwa merangkul dalam arti luas berarti bukan saja menerima namun juga mengajak bersama-sama dan bekerjasama bahkan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok atau

masyarakat yang dalam hal ini fokus kajian studinya yakni di RT 02 RW 23 Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Semakin banyaknya warga pendatang dan semakin memenuhi Ngropoh, maka semakin menjadi kekhawatiran tersendiri akan hilang dan bercampurnya budaya asli Ngropoh yang ramah dan bernuansa budaya desa menuju budaya asing yang notabeneanya berasal dari beranekaragam latar belakang yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Akulturasi lahir apabila kontak antara dua kebudayaan atau lebih itu berlangsung terus menerus dengan intensitas yang cukup. Akulturasi sebagai akibat kontak kebudayaan ini dapat terjadi dalam salah satu kebudayaan pesertanya tetapi dapat pula terjadi didalam kedua kebudayaan yang menjadi pesertanya (Joyomartono, 1991: 41).

3. Peran Ketua RT

Poerwodarminta (1995: 571) menyebutkan bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Friedman (1998: 286 dalam Firana, 2014: 13) menyatakan bahwa peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.

Menurut Somadisastra (dalam Sumintarsih, et. al., 1992: 52-63 dalam Febriana, 2013) ada tiga kepemimpinan yang lahir atas dasar jalur kekuasaan formal dalam pemerintahan, yaitu: kepemimpinan formal, kepemimpinan formal tradisional, kepemimpinan di luar kepemimpinan formal dan kepemimpinan formal tradisional. Selain kepemimpinan formal dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan desa, terdapat pula pemimpin-pemimpin informal atau yang sering dikenal dengan tokoh masyarakat. Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang timbul dari adanya unsur kekayaan, pendidikan, keagamaan, ataupun keturunan.

Tugas dan fungsi ketua RT dan ketua RW sesuai dengan pendapat Widjaja (2003: 116 dalam Febriana, 2013) adalah sebagai berikut. Rukun tetangga (RT) mempunyai tugas antara lain: (1) membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, (2) memelihara kerukunan hidup warga, (3) menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Layuk (2013: 165-166) menyatakan bahwa kepemimpinan ketua RT dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangatlah diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama. Peran Ketua RT sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mempercepat akses pelayanan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kewargaan. Fungsi RT/RW disamping melakukan fungsi-fungsi

yang sifatnya pemberian pelayanan pada warga, juga melakukan fungsi koordinasi dan fungsi fasilitasi pada kegiatan tertentu, misal pada acara peringatan HUT RI setiap tanggal 17 Agustus, sumpah pemuda dan beberapa acara lainnya.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2005: 142-150 dalam Banar, 2014: 10-12) yaitu memainkan peranan dominan dalam proses pembangunan. Peran yang dikaji adalah selaku *stabilisator*, *inovator*, *modernisator*, *pelopor* dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. *Stabilisator*, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejala sosial, apalagi yang menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, antara lain : kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan ; pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan “loncatan jauh ke depan”.
- b. *Inovator*, dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru seperti metode baru, sistem baru, dan cara fikir baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki

tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.

- c. *Modernisator*, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara modern yang kuat, mandiri, dan diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan : penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang di miliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang handal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang "nasibnya", kesediaan mengambil resiko, dan orientasi masa depan serta bersedia menerima masa depan.
- d. *Pelopor*, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal yang baik seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, kepeloporan dalam kejujuran seperti dalam hal memberantas korupsi dan kolusi, kepeloporan dalam penegakan disiplin seperti ketaatan pada jam kerja yang berlaku, kepeloporan

dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan seperti dalam hal perolehan izin dan berlalu lintas, kepeloporan kesediaan berkorban demi kepentingan negara seperti dalam hal bela negara dan bayar pajak, kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan tetapi melakukan daur ulang, kepeloporan dalam penerapan objektivitas seperti dalam bentuk perlakuan terhadap orang lain yang tidak diskriminatif, kepeloporan dalam peningkatan efisiensi melalui gaya dan pola hidup yang tidak boros dan gemar menabung, dan kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan.

- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak dimintai oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan oleh pemerintah.

4. Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat.

Rohati (2013: 18) menyebutkan bahwa solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari mengarah pada integrasi maupun kekompakan masyarakat untuk menjalankan kehidupan yang membutuhkan orang lain. Hubungan dalam masyarakat yang membentuk suatu solidaritas sosial didasarkan oleh bervariasi alasan maupun kesadaran dari individu yang menjalankannya. Masyarakat sederhana solidaritas yang terjalin sering didasarkan oleh adanya rasa kekeluargaan maupun kebersamaan. Sedangkan mayoritas masyarakat modern yang lebih kompleks memiliki rasa solidaritas yang erat antar warga yang sudah mulai memudar karena kesibukan dan rasa individualistis yang tinggi.

Durkheim (Ruhati, 2013: 19) membagi bentuk solidaritas menjadi dua bentuk yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas organik yaitu perekat sosial yang datang dari pembagian kerja dan masyarakatnya memiliki perbedaan tanggung jawab serta dikarakteristikan dengan spesialisasi. Solidaritas organik lebih di dominasi oleh kesadaran individu karena kepentingan dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu. Bentuk solidaritas seperti ini merupakan suatu perkembangan yang terjadi dalam masyarakat modern maupun masyarakat industri. Solidaritas yang terjalin dalam masyarakat ini saling bergantung satu sama lain untuk

melaksanakan tugas-tugas tertentu karena tugas-tugas yang dijalankan antara satu individu dengan individu lain saling berkaitan.

Masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis, kesadaran kolektif melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya. Sedangkan masyarakat yang mempunyai solidaritas organik memiliki kesadaran kolektif yang dibatasi oleh kelompok, tidak adanya rasa yang terlalu mengikat, dan adanya kepentingan individu yang lebih dominan. Bentuk solidaritas mekanik biasanya terdapat pada masyarakat yang masih tradisional dalam skala kecil.

Bentuk solidaritas suatu masyarakat tentunya mempengaruhi tingkat partisipasi dari masyarakat tersebut. Sumaryadi (2013: 46) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan. Selain itu, Koentjaraningrat (2004: 79) menyebutkan bahwa dalam konsep "partisipasi masyarakat dalam pembangunan" seringkali "partisipasi masyarakat yang intensif" disamakan dengan frekuensi tinggi turut sertanya rakyat pedesaan dalam aktivitas-aktivitas bersama.

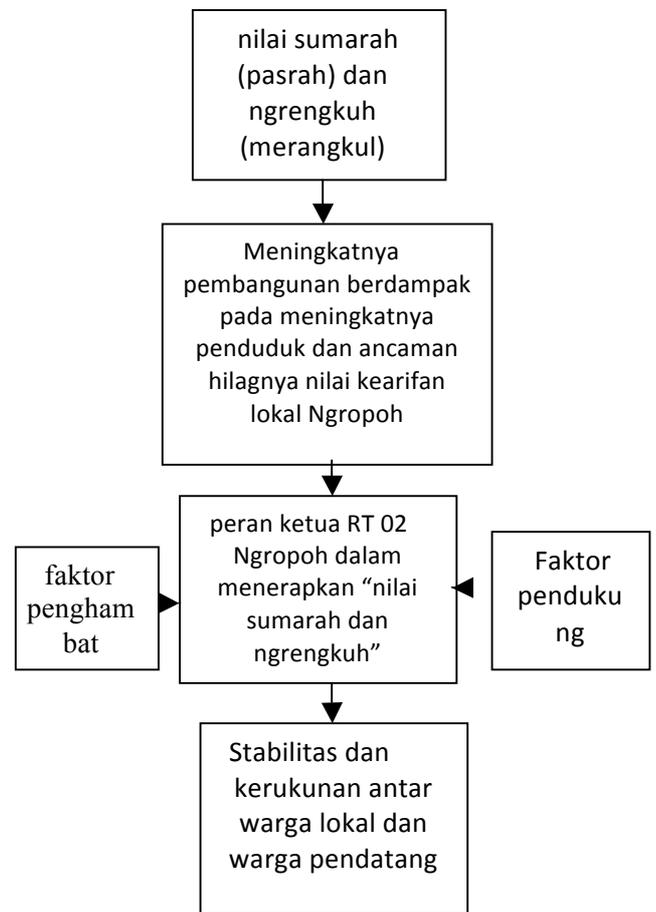
Joyomartono (1991: 82) menyebutkan bahwa partisipasi aktif semua individu di dalam masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan, seperti yang tercantum dalam bab penutup GBHN merupakan faktor

utama keberhasilan program pembangunan. Baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang partisipasi yang sangat tinggi dari warga negaranya adalah hal yang sangat utama, maka akan disayangkan sikap apatis dan masa bodoh dari warganya berkaitan dengan partisipasi ini. Bertolak dari semua itu, tindakan seseorang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya yang kompleks (Djojomartono, et. al. (Warto), 1996: 9-10).

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut (Huraerah, 2008: 102 dalam Nuring, 2013: 61):

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban

Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian terhadap peran ketua RT 02 Ngropoh dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” di tengah meningkatnya pembangunan studi di RT 02 RW 23 Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.

Bagdon dan Taylor (1975: 5 dalam Moleong, 2005: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu

tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Selain itu, penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki konsep mengembangkan data, unik, spesifik, populasi kecil, dan mendalam (detail).

B. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pemilihan informan adalah teknik yang digunakan untuk memilih sebagian dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel atau dalam hal pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam hal menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti oleh peneliti. Sugiyono (2005: 96) menyebutkan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk menentukan subyek penelitian sebagai sumber data menggunakan *purposive sampling*, tidak ditentukan terlebih dahulu siapa informannya melainkan dipilih berdasarkan fokus penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria yakni ketua RT 02 Ngropoh, tokoh masyarakat RW 23 Ngropoh, panitia dalam beberapa agenda dusun dalam merangkul seluruh warga, warga lokal yang

menetap di Ngropoh, warga pendatang yang menetap di Ngropoh, warga pendatang yang kos di Ngropoh, dan warga yang bekerja sebagai penunggu atau menjaga kos (bukan induk sumo).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian peneliti dalam hal ini adalah di RT 02 RW 23 Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data primer yakni kepala Dukuh Ngropoh, kepala RW 23 Ngropoh, Kaum RT 02, ketua RT 02 dan RT 01 di RW 23 Ngropoh, warga lokal dan warga pendatang RT 02 RW 23 Ngropoh Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi, studi kepustakaan, buku, koran, majalah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek yang diteliti dengan bantuan media cetak dan media internet.

E. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian serta pengambilan data di lapangan dilangsungkan dari tanggal 29 Oktober 2016 sampai 31 Januari 2017.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi .

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencacatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang

dilakukan. Sutrisno Hadi (1987 dalam Sugiyono, 2005: 166) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.

Moleong, J. Lexy. (2005: 186) menyebutkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Sugiyono (2013: 137) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Wawancara yang di pilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dan terstruktur. Moleong (2011: 189-190) menyatakan bahwa wawancara terbuka adalah wawancara yang dalam hal ini para subjeknya tahu bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengetahui pula maksud dan tujuan wawancara itu, sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan yang bertujuan mencari hipotesis kerja.

Dokumentasi merupakan pelengkap teknik wawancara dan observasi dari penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan oleh subyek penelitian. Dokumentasi lebih pada

mengumpulkan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan, seperti foto-foto kegiatan sebagai data penguat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

analisis data dapat disebut dengan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 244).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman . Miles dan Huberman (1984 dalam Sugiyono, 2013: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

H. Validitas Data

Validitas merupakan suatu bentuk pembuktian bahwa apa yang di amati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia kenyataan (Nasution, 2003: 105). Dalam penelitian ini, untuk memeriksa validitas data digunakan teknik triangulasi yang merupakan sebuah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan pengecekan atau

pembandingan terhadap data itu (Husaini, et. al., 1995: 47). Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dicari dari tiga sumber saja. Prinsipnya adalah, menurut teknik triangulasi, informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias sebuah kelompok. Dalam hal ini, triangulasi dapat berarti adanya informan-informan yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda mengenai sesuatu. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin

in terhadap kebenaran dan kelengkapan data dan dapat dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti puas dengan datanya, sampai yakin datanya valid (Afrizal, 2015: 168).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Informan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

RW 23 Ngropoh merupakan salah satu dari empat RW yang ada di Padukuhan Ngropoh, yakni RW 23 Ngropoh, RW 24 Nglaren, RW 25 Widoro, dan RW 62 Condongsari. Secara geografis, RW 23 Ngropoh berada di sebelah utara berbatasan dengan Padukuhan Ngringin, sebelah selatan berbatasan dengan Padukuhan Nglaren RW 24 dan RW 25, sebelah barat berbatasan dengan Padukuhan Kaliwaru, dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Perumnas Seturan. RT 02 merupakan salah satu dari dua RT yang ada di RW 23 yakni RT 01 dan RT 02. Secara geografis, RT 02 Ngropoh berbatasan sebelah timur dengan Jalan Wahid Hasyim, sebelah barat berbatasan dengan Kaliwaru, sebelah utara berbatasan

dengan Nggorongon, dan sebelah selatan berbatasan dengan Widoro.

Keadaan masyarakat RW 23 Ngropoh terutama di RT 02 berada dalam kondisi yang damai antar warga lokal dan warga pendatang. Warga lokal yang bersikap terbuka, ramah, dan senantiasa merangkul semua warganya termasuk warga pendatang bahkan anak kos melalui upaya mereka dengan selalu mengajak terlibat langsung dalam setiap agenda yang diadakan di daerah ini merupakan salah satu kekhasan tersendiri dari daerah ini diantara daerah pinggiran kota lainnya. Walaupun daerah ini termasuk dalam kategori daerah pinggiran kota namun kondisi lingkungannya dari segi interaksi sosial, solidaritas dan budayanya masih sangat identik dengan kehidupan desa yang sangat menjunjung tinggi nilai solidaritas.

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala dukuh, ketua RW 23, ketua RT 01 dan ketua RT 02 RW 23, kaum RW 23, ketua PKK RT 01 dan 02 RW 23 dan ketua PKK Padukuhan Ngropoh, ketua pemuda dan beberapa ketua agenda dari kalangan pemuda RW 23 Ngropoh, warga lokal biasa, warga pendatang sebagai penjaga kos-kosan, dan warga pendatang yang tinggal di kos-kosan dan sudah menetap lama di RW 23 lebih utamanya di RT 02.

a. Pendidikan

Berdasarkan data teridentifikasi di RT 02 RW 23 dengan jumlah penduduknya yakni sebanyak 315 sebagian besar dari penduduknya berpendidikan akhir sampai di tingkat SLTA yakni sebanyak 90 orang.

Letaknya strategis dan merupakan daerah pinggiran kota, namun sebagian besar penduduknya adalah warga lokal dan masih berkepribadian pedesaan, menjadi salah satu pemicu dan sebab utama mengapa di daerah ini tingkat pendidikan dari masyarakatnya pun masih sampai di tingkat SLTA karena pola pikir mereka yang masih berusaha menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang semakin maju dari yang sebelumnya.

b. Mata Pencarian

Berdasarkan data disebutkan bahwa dari 315 jumlah penduduk di RT 02 RW 23 Ngropoh, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pelajar/mahasiswa. Hal tersebut berbanding lurus dengan lokasi RT 02 RW 23 yang berada di daerah pinggiran kota yang strategis dan dekat dengan instansi pendidikan termasuk diantara kampus Amikom, UII dan UPN. Lokasi yang strategis dan banyak didatangi oleh pendatang pelajar/mahasiswa yang ingin kos menjadi salah satu pemicu atau penggerak warga untuk bisa meningkatkan minat belajar mereka sehingga berdampak pada pekerjaan mayoritas RT 02 RW 23 Ngropoh saat ini yakni sebagai pelajar/mahasiswa.

c. Agama

Berdasarkan data diambil kesimpulan bahwa di RT 02 RW 23 terdapat tiga jenis agama yang dianut oleh warganya. Mayoritas warga menganut ajaran agama islam yakni sebanyak 277 dari 315 jumlah penduduknya. Jumlah mayoritas dari penduduk RT 02 RW 23 Ngropoh yang beragama Islam menjadi salah satu alasan mengapa agenda keagamaan seperti halnya pengajian

ibu-ibu, *yasinan* bapak-bapak, pengajian umum serta pengajian bulan-bulan Islam lainnya menjadi sangat ramai diminati warga dan merupakan salah satu upaya guna merangkul seluruh warganya.

B. Deskripsi Temuan Utama

1. Peran Ketua RT Dalam Menerapkan “Nilai *Sumarah* Dan *Ngrengkuh*” di Tengah Meningkatnya Pembangunan

Nilai *sumarah* (pasrah) dan *ngrengkuh* (merangkul) merupakan nilai kearifan lokal warga Ngropoh yang sudah ada sejak dahulu dan masih tetap terjaga sampai sekarang walaupun kondisinya saat ini di Ngropoh sudah terdapat banyak para penduduk pendatang dengan beragam latar belakang budaya yang berbeda-beda yang menjadi warga pendatang tetap dan kos di Ngropoh yang salah satunya merupakan akibat meningkatnya pembangunan di Ngropoh.

Dalam hal ini, peneliti berhasil mendapatkan data dalam penelitiannya yakni berupa data yang menyebutkan bahwa terdapat bentuk nyata dari peran ketua RT 02 Ngropoh dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” yang menerapkan lima peran pemerintah seperti yang disampaikan oleh Siagin yakni sebagai *stabilitator*, *inovator*, *modernisator*, *pelopor*, dan pelaksana sendiri.

a. Stabilitator

Bentuk nyata dari peran ketua RT sebagai stabilitator yakni: ketua RT 02 sering memberikan saran kepada warga pendatang untuk membuat acara perkenalan kepada warga lokal yang merupakan acara dan tradisi yang sudah ada sejak

dahulu di RT 02 RW 23, ketua RT mensosialisasikan norma-norma kampung kepada seluruh warga bahkan warga pendatang yang kos dalam setiap pertemuan atau pada waktu warga pendatang buka kos baru agar semua warga bahkan anak kos tahu dan mau mematuhi norma yang ada di RT 02 RW 23 Ngropoh, Ketua RT 02 sering mengingatkan, sering *ngelingke* dan menggerakkan gotong royong dan kerja bakti kepada seluruh warga, ketua RT 02 selalu mendukung dengan memberi bantuan (tenaga dan finansial) setiap agenda guna merangkul warga seperti acara pengajian ibu-ibu atau pengajian umum lainnya, dan ketua RT 02 selalu mengajak para pendatang untuk ikut bergabung dalam acara-acara kampung dan terlibat langsung didalamnya.

b. Inovator

Bentuk nyata dari peran ketua RT sebagai inovator yakni: ketua RT sering memberi usul dan pengarahan dalam setiap agenda termasuk memberi strategi dalam merangkul warga, ketua RT membuat kebijakan baru agar ronda dan jimpitan dapat berjalan efektif dan efisien, dan ketua RT 02 memiliki kemampuan dan metode serta strategi dalam mendidik dan merangkul seluruh warganya salah satunya yakni mencari dan memilih hari untuk acara-acara sesuai dengan waktu luangnya warga.

c. Modernisator

Bentuk nyata dari peran ketua RT sebagai modernisator yakni: Ketua RT memanfaatkan dan memberdayakan SDM yang ada, adanya kepemimpinan yang demokratis dan keterbukaan kepada warga karena setiap keputusan yang akan ditegakkan di RT 02 walau usul

dari tokoh masyarakat, namun harus dengan kesepakatan warga dan warga harus tahu, ketua RT 02 memiliki visi yang jelas tentang masa depan yakni dengan totalitas dalam setiap agenda dan mau berkorban serta mengutamakan kemaslahatan warga, dan ketua RT 02 memiliki orientasi masa depan yakni melalui sikapnya yang senang kepada setiap pendatang termasuk anak kos untuk memperkenalkan diri dan mau bersilaturahmi berbagi ilmu yang didapat di kampus untuk kemajuan seluruh warga.

d. Pelopor

Bentuk nyata dari peran ketua RT sebagai pelopor yakni: ketua RT menjadi pelopor untuk peduli kepada lingkungan sekitar, dan ketua RT menjadi salah satu pelopor dalam agenda-agenda seperti peringatan HUT RI, sumpah pemuda, pengajian dan hari kurban

e. Pelaksana sendiri

Bentuk nyata dari peran ketua RT sebagai pelaksana sendiri yakni: ketua RT 02 langsung menegur warga termasuk warga kos yang melanggar norma dan ketua RT 02 RW 23 Ngropoh langsung terjun membantu menyelesaikan setiap agenda yang diselenggarakan guna merangkul seluruh warga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Ketua RT Dalam Menerapkan “Nilai Sumarah Dan Ngrengkuh” di Tengah Meningkatnya Pembangunan

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung peran ketua RT dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” yakni: dominasi nilai solidaritas

khususnya yang terlihat dari warga lokal yang mencakup semua kelompok yakni kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, dan kelompok pemuda, Partisipasi aktif masyarakat, antusias warga termasuk pendatang yang luar biasa besar dalam setiap agenda, keinginan warga pendatang untuk kenal dengan tetangga, sebagian besar warga bahkan warga pendatang yang menetap dan mau menaati serta patuh kepada pemimpin, norma dan peraturan yang ada, dan warga pendatang yang bisa langsung berbaur dengan warga lokal bahkan mengeluarkan hewan kurban sama seperti penduduk asli sehingga menunjang kesejahteraan seluruh warga.

b. Faktor Penghambat

Faktor pendukung peran ketua RT dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” yakni: Pembangunan yang semakin meningkat terutama pembangunan kos-kosan, terjadinya perubahan bentuk partisipasi masyarakat dari partisipasi dalam bentuk tenaga menjadi partisipasi dalam bentuk uang terutama dari warga pendatang, kesibukan dan minat serta kesadaran dari warga pendatang khususnya pendatang kos yang bermacam-macam, rasa nasionalisme sebagian warga yang masih kurang, adanya kos bulanan yang menghambat proses sosialisasi, Belum adanya penghubung antara warga lokal terutama pemuda dengan anak-anak kos pemuda/i, dan hujan (cuaca yang tidak mendukung).

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Peran Ketua RT Dalam Menerapkan “Nilai *Sumarah* Dan *Ngrengkuh*” di Tengah Meningkatnya Pembangunan

Kearifan atau *wisdom* dapat dianalisis sebagai solusi mengatasi dinamika masyarakat pluralitas yang tinggi; kearifan ditunjukkan dalam wujud memberikan karakter yang terpuji seperti halnya bersifat pasrah yang positif yakni rasa keterbukaan bahkan mau merangkul (*sumarah* dan *ngrengkuh*) kepada seluruh warga, tidak mengumbar janji, tidak mementingkan diri atau kelompok, memberikan keteladanan, serta menerapkan pola kehidupan yang beriman dan bertakwa (Sumaryadi, 2013: 203-204).

Purwadi (2006: 323) menyebutkan bahwa istilah *sumarah* dapat diartikan dengan istilah pasrah menyerah. Menurut Arymurthy, et. al. (1989: 1) *sumarah* menunjukkan kepada tingkat kesadaran yang memberi jalan bagi manusia untuk berserah diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan makna *rengkuh* sendiri dalam Purwadi (2006: 292) adalah rangkul. Peneliti dalam hal ini mencoba menafsirkan secara universal bahwa merangkul dalam arti luas berarti bukan saja menerima namun juga mengajak bersama-sama dan bekerjasama bahkan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok atau masyarakat yang dalam hal ini fokus kajian studinya yakni di RT 02 RW 23 Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Friedman (1998: 286 dalam Firana, 2014: 13) menyatakan bahwa

peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Selain itu, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagin (2005: 142-150 dalam Banar, 2014: 10-12) yaitu memainkan peranan selaku stabilitator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil menemukan data bahwa terdapat lima jenis peran pemerintah sebagaimana disampaikan Siagin yang dilakukan oleh ketua RT 02 RW 23 Ngropoh selaku pemimpin formal yang menjalankan perannya sebagai *stabilitator*, *inovator*, *modernisator*, *pelopor*, dan *pelaksana sendiri* dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” di tengah meningkatnya pembangunan.

a. Stabilitator

Pemerintah berperan selaku *stabilitator* maksudnya yakni berperan dalam mewujudkan perubahan dan tidak berubah menjadi gejolak sosial apalagi yang menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, antara lain : kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan ; pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan “loncatan jauh ke depan” (Siagian, 2005: 142-150 dalam Banar, 2014: 10-12). Bentuk nyata peran ketua RT sebagai stabilitator yakni: ketua RT 02 sering memberikan saran

kepada warga pendatang untuk membuat acara perkenalan kepada warga lokal yang merupakan acara dan tradisi yang sudah ada sejak dahulu di RT 02 RW 23, ketua RT mensosialisasikan norma-norma kampung kepada seluruh warga bahkan warga pendatang yang kos dalam setiap pertemuan atau pada waktu warga pendatang buka kos baru agar semua warga bahkan anak kos tahu dan mau mematuhi norma yang ada di RT 02 RW 23 Ngropoh, ketua RT 02 sering mengingatkan, sering *ngelingke* dan menggerakkan gotong royong dan kerja bakti kepada seluruh warga, ketua RT 02 selalu mendukung dengan memberi bantuan (tenaga dan finansial) setiap agenda guna merangkul warga seperti acara pengajian ibu-ibu atau pengajian umum lainnya, dan ketua RT 02 selalu mengajak para pendatang untuk ikut bergabung dalam acara-acara kampung dan terlibat langsung didalamnya.

b. Inovator

Pemerintah berperan selaku *inovator* maksudnya yakni pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru seperti metode baru, sistem baru, dan cara fikir baru. (Siagian, 2005: 142-150 dalam Banar, 2014: 10-12). Bentuk nyata peran ketua RT sebagai inovator yakni: ketua RT sering memberi usul dan pengarahan dalam setiap agenda termasuk memberi strategi dalam merangkul warga, ketua RT membuat kebijakan baru agar ronda dan jimpitan dapat berjalan efektif dan efisien, dan ketua RT 02 memiliki kemampuan dan metode serta strategi dalam mendidik dan merangkul seluruh warganya salah satunya yakni mencari dan

memilih hari untuk acara-acara sesuai dengan waktu luangnya warga.

c. Modernisator

Pemerintah berperan selaku *Modernisator* maksudnya yakni pemerintah dalam hal ini harus mampu mewujudkan negara modern yang kuat, mandiri, dan diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan : penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang di miliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang handal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang "nasibnya", kesediaan mengambil resiko, dan orientasi masa depan serta bersedia menerima masa depan (Siagian, 2005: 142-150 dalam Banar, 2014: 10-12). Bentuk nyata peran ketua RT sebagai modernisator yakni: ketua RT memanfaatkan dan memberdayakan SDM yang ada, adanya kepemimpinan yang demokratis dan keterbukaan kepada warga karena setiap keputusan yang akan ditegakkan di RT 02 walau usul dari tokoh masyarakat, namun harus dengan kesepakatan warga dan warga harus tahu, ketua RT 02 memiliki visi yang jelas tentang masa depan yakni dengan totalitas dalam setiap agenda dan mau berkorban serta mengutamakan kemaslahatan warga, dan ketua RT 02 memiliki orientasi masa depan yakni melalui sikapnya

yang senang kepada setiap pendatang termasuk anak kos untuk memperkenalkan diri dan mau bersilaturahmi berbagi ilmu yang didapat di kampus untuk kemajuan seluruh warga.

d. Pelopor

Pemerintah berperan selaku stabilitator maksudnya yakni selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal yang baik seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, kepeloporan dalam kejujuran seperti dalam hal memberantas korupsi dan kolusi, kepeloporan dalam penegakan disiplin seperti ketaatan pada jam kerja yang berlaku, kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan seperti dalam hal perolehan izin dan berlalu lintas, kepeloporan kesediaan berkorban demi kepentingan negara seperti dalam hal bela negara dan bayar pajak, kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan tetapi melakukan daur ulang, kepeloporan dalam penerapan objektivitas seperti dalam bentuk perlakuan terhadap orang lain yang tidak diskriminatif, kepeloporan dalam peningkatan efisiensi melalui gaya dan pola hidup yang tidak boros dan gemar menabung, dan kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan (Siagian, 2005: 142-150 dalam Banar, 2014: 10-12). Bentuk nyata peran ketua RT sebagai pelopor yakni:

ketua RT menjadi pelopor untuk peduli kepada lingkungan sekitar, dan ketua RT menjadi salah satu pelopor dalam agenda-agenda seperti peringatan HUT RI, sumpah pemuda, pengajian dan hari kurban. Selain itu, peran ketua RT tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Layuk yakni: kepemimpinan ketua RT dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangatlah diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama. Peran Ketua RT sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mempercepat akses pelayanan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kewargaan. Selain melakukan fungsi-fungsi yang sifatnya pemberian pelayanan pada warga, ketua RT/RW juga melakukan fungsi koordinasi dan fungsi fasilitasi pada kegiatan tertentu. Jadi, dalam hal ini peneliti mengamati dan menganalisis bahwa ketika tokoh masyarakat menjadi pelopor dalam agenda-agenda seperti peringatan HUT RI, sumpah pemuda, pengajian dan hari kurban, maka hal tersebut secara tidak langsung sudah mencerminkan fungsi ketua RT/RW dalam melakukan fungsinya yakni mengkoordinasi dan kegiatan tertentu sebagaimana yang disampaikan oleh Layuk dalam teorinya terkait fungsi ketua RT/RW, Layuk (2013: 165-166).

e. Pelaksana sendiri

Pemerintah berperan selaku pelaksana sendiri maksudnya yakni meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan

negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak dimintai oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan oleh pemerintah (Siagian, 2005: 142-150 dalam Banar, 2014: 10-12). Bentuk nyata peran ketua RT sebagai pelaksana sendiri yakni: ketua RT 02 langsung menegur warga termasuk warga kos yang melanggar norma dan ketua RT 02 RW 23 Ngropoh langsung terjun membantu menyukseskan setiap agenda yang diselenggarakan guna merangkul seluruh warga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Ketua RT Dalam Menerapkan “Nilai Sumarah Dan Ngrenghuh” di Tengah Meningkatnya Pembangunan

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung peran ketua RT dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrenghuh*” yakni: *pertama*, dominasi nilai solidaritas mekanik khususnya yang terlihat dari warga lokal yang mencakup semua kelompok yakni kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, dan kelompok pemuda. Rohati (2013: 18) menyebutkan bahwa solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari mengarah pada integrasi maupun kekompakan masyarakat untuk menjalankan kehidupan yang membutuhkan orang lain. Masyarakat sederhana solidaritas yang terjalin sering didasarkan oleh adanya rasa kekeluargaan

maupun kebersamaan. *Kedua*, Partisipasi aktif dari masyarakat. Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat yakni partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran, dan partisipasi sosial (Huraerah, 2008: 102 dalam Nuring, 2013: 61). *Ketiga*, antusias warga termasuk pendatang yang luar biasa besar dalam setiap agenda, keinginan warga pendatang untuk kenal dengan tetangga, sebagian besar warga bahkan warga pendatang yang menetap dan mau menaati serta patuh kepada pemimpin, norma dan peraturan yang ada. Prihanto (2010: 139) menyatakan bahwa pada dasarnya, penduduk asli telah memiliki aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi oleh para pendatang dan bersifat mengikat, sehingga para pendatang harus menyesuaikan dengan aturan-aturan tersebut. Meski telah mengalami penyesuaian, pendatang tetap membawa latar belakang sosial budaya sendiri sehingga meskipun sedikit tetap memberikan pengaruh bagi penduduk setempat. Namun pada kenyataannya, warga pendatang di Ngropoh tetap mau menaati serta patuh kepada pemimpin, norma dan peraturan yang ada. *Keempat*, Warga pendatang yang bisa langsung berbaur dengan warga lokal bahkan mengeluarkan hewan kurban sama seperti penduduk asli sehingga menunjang kesejahteraan seluruh warga.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat peran ketua RT dalam menerapkan “nilai

sumarah dan ngrengkuh” yakni: *pertama*, Pembangunan yang semakin meningkat terutama pembangunan kos-kosan. Ngropoh merupakan daerah yang dapat dikategorikan sebagai daerah pinggiran kota. Beesly (dalam Subroto, 1997 dalam Prihanto, 2010: 134) menyebutkan empat karakter yang dipakai untuk mengklasifikasikan suatu daerah yang dapat disebut sebagai *urban fringe*. Salah satu cirinya yakni suatu wilayah yang sebelumnya merupakan daerah pedesaan dengan dominasi untuk lahan pertanian, komunitas masyarakat pedesaan yang menjadi sasaran serbuan perkembangan kota dan menjadi ajang spekulasi tanah bagi para pengembang. *Kedua*, Terjadinya perubahan bentuk partisipasi masyarakat dari partisipasi dalam bentuk tenaga menjadi partisipasi dalam bentuk harta benda terutama dari warga pendatang. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya sedangkan partisipasi harta benda adalah partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya (Huraerah, 2008: 102 dalam Nuring, 2013: 61). *Ketiga*, kesibukan dan minat serta kesadaran dari warga pendatang khususnya pendatang kos yang bermacam-macam. Mobilitas penduduk bermacam-macam bentuknya, yaitu urbanisasi, transmigrasi, perpindahan penduduk

ke negara-negara lain, dan kembali lagi ke desa-desa asalnya. Dalam perpindahan penduduk itu, ada perpindahan dari tempat asalnya untuk selama-lamanya, atau yang lebih dikenal dengan istilah migrasi selama hidup atau *life time migration*. Salah satu Perpindahan penduduk yang berlangsung hanya untuk sementara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sirkulasi ; dan ada penduduk yang bekerja diluar desa atau kotanya, tetapi mereka kembali lagi pada hari itu juga, atau yang lebih dikenal dengan istilah *penglaju* (Silalahi, 1985: 570). *Keempat*, rasa nasionalisme sebagian warga yang masih kurang. *Kelima*, adanya kos bulanan yang menghambat proses sosialisasi. *Keenam*, belum adanya penghubung antara warga lokal terutama pemuda dengan anak-anak kos pemuda/i. *Ketujuh*, hujan (cuaca yang tidak mendukung).

Simpulan

1. Terdapat bentuk nyata dari peran ketua RT 02 Ngropoh dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” di RW 23 yang menerapkan lima peran pemerintah seperti yang disampaikan oleh Siagin yakni sebagai *stabilitator*, *inovator*, *modernisator*, *pelopor*, dan pelaksana sendiri.

a. Stabilitator

Peran ketua RT sebagai stabilitator yakni: ketua RT 02 sering memberikan saran kepada warga pendatang untuk membuat acara perkenalan kepada warga lokal yang merupakan acara dan tradisi yang sudah ada sejak dahulu di RT 02 RW 23, ketua RT

mensosialisasikan norma-norma kampung kepada seluruh warga bahkan warga pendatang yang kos dalam setiap pertemuan atau pada waktu warga pendatang buka kos baru agar semua warga bahkan anak kos tahu dan mau mematuhi norma yang ada di RT 02 RW 23 Ngropoh, ketua RT 02 sering mengingatkan, sering *ngelingke* dan menggerakkan gotong royong dan kerja bakti kepada seluruh warga, ketua RT 02 selalu mendukung dengan memberi bantuan (tenaga dan finansial) setiap agenda guna merangkul warga seperti acara pengajian ibu-ibu atau pengajian umum lainnya, dan ketua RT 02 selalu mengajak para pendatang untuk ikut bergabung dalam acara-acara kampung dan terlibat langsung didalamnya.

b. Inovator

Peran ketua RT sebagai inovator yakni: ketua RT sering memberi usul dan pengarahan dalam setiap agenda termasuk memberi strategi dalam merangkul warga, ketua RT membuat kebijakan baru agar ronda dan jimpitan dapat berjalan efektif dan efisien, dan ketua RT 02 memiliki kemampuan dan metode serta strategi dalam mendidik dan merangkul seluruh warganya salah satunya yakni mencari dan memilih hari untuk acara-acara sesuai dengan waktu luangnya warga.

c. Modernisator

Peran ketua RT sebagai modernisator yakni: ketua RT memanfaatkan dan memberdayakan SDM yang ada, adanya kepemimpinan yang

demokratis dan keterbukaan kepada warga karena setiap keputusan yang akan ditegakkan di RT 02 walau usul dari tokoh masyarakat, namun harus dengan kesepakatan warga dan warga harus tahu, ketua RT 02 memiliki visi yang jelas tentang masa depan yakni dengan totalitas dalam setiap agenda dan mau berkorban serta mengutamakan kemaslahatan warga, dan ketua RT 02 memiliki orientasi masa depan yakni melalui sikapnya yang senang kepada setiap pendatang termasuk anak kos untuk memperkenalkan diri dan mau bersilaturahmi berbagi ilmu yang didapat di kampus untuk kemajuan seluruh warga.

d. Pelopor

Peran ketua RT sebagai pelopor yakni: ketua RT menjadi pelopor untuk peduli kepada lingkungan sekitar dan ketua RT menjadi salah satu pelopor dalam agenda-agenda seperti peringatan HUT RI, sumpah pemuda, pengajian dan hari kurban.

e. Pelaksana sendiri

Peran ketua RT sebagai pelaksana sendiri yakni: ketua RT 02 langsung menegur warga termasuk warga kos yang melanggar norma, ketua RT 02 RW 23 Ngropoh langsung terjun membantu menyelesaikan setiap agenda yang diselenggarakan guna merangkul seluruh warga, dan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat peran tokoh masyarakat dusun dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*”.

2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat peran tokoh masyarakat dusun dalam menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” di tengah meningkatnya pembangunan yakni:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung peran ketua RT yakni: dominasi nilai solidaritas mekanik, Partisipasi aktif dari masyarakat, antusias warga termasuk pendatang yang luar biasa besar dalam setiap agenda, keinginan warga pendatang untuk kenal dengan tetangga, sebagian besar warga bahkan warga pendatang yang menetap dan mau menaati serta patuh kepada pemimpin, norma dan peraturan, dan warga pendatang yang bisa langsung berbaur dengan warga lokal.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat peran ketua RT yakni: pembangunan yang semakin meningkat terutama kos-kosan, terjadinya perubahan bentuk partisipasi masyarakat dari tenaga menjadi partisipasi dalam bentuk uang, kesibukan dan minat serta kesadaran dari warga pendatang khususnya pendatang kos yang bermacam-macam, rasa nasionalisme sebagian warga yang masih kurang, adanya kos bulanan yang menghambat proses sosialisasi, belum adanya penghubung antara warga lokal terutama pemuda dengan anak-anak kos pemuda/i, dan hujan (cuaca yang tidak mendukung).

Saran

1. Untuk ketua RT 02 Ngropoh ketua RT 02 Ngropoh diharapkan tetap konsisten bahkan mampu meningkatkan perannya dalam setiap agenda Ngropoh untuk merangkul seluruh warganya. Hal tersebut merupakan “figure” untuk daerah lain yang masuk kedalam kategori daerah pinggiran kota karena RT 02 RW 23 Ngropoh masih tetap mampu menjaga nilai kearifan lokalnya yakni “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” di tengah meningkatnya pembangunan
2. Untuk masyarakat pendatang Ngropoh Masyarakat pendatang yang bersifat menetap atau hanya sekedar kos di Daerah Ngropoh diharapkan memahami dan mampu berpartisipasi aktif dalam setiap agenda Ngropoh yang secara tidak langsung telah berpartisipasi aktif dalam mendukung peran ketua RT 02 Ngropoh untuk menerapkan “nilai *sumarah* dan *ngrengkuh*” di tengah meningkatnya pembangunan dan meningkatnya warga pendatang.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Banar, Z. (2014). *Peran Pemerintah Dalam Mempertahankan Fungsi Lahan Pertanian di Wilayah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Beratha. (1982). *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djojomartono, et. al. (Warto). (1996). *Peran Ulama Dalam Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat Jawa Tengah*. Semarang: Percetakan Cv. Indragiri Semarang.
- Febriana, I. 2013. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan di Desa Banjarpasar Kecamatan Buluspesantren Kebumen*. Universitas Negeri Semarang. Tersedia di <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/1015>. Diakses Pada 26 Oktober 2016.
- Firana. (2014). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011 . *Artikel E-Journal*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Hal.13.
- Husaini, et. al. (1995). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joyomartono, M. (1991). *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat Dalam Pembangunan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas dan*

- Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Layuk, R. M. (2013). Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(1): 165 – 178.
- Moleong, J. Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Penerbit Tasito Bandung.
- Nuring, S. L. (2013). Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program (Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 1(1): 61-134.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Prihanto, T. (2010). Perubahan Spasial Dan Sosial-Budaya Sebagai Dampak Megaurban Di Daerah Pinggiran Kota Semarang. *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*. 1(12): 134-139.
- Rohati. (2013). *Solidaritas Sosial Antar Warga Di Rusunawa Projo Tamansari*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Silalahi, et. al. (1985). *Masalah Pembangunan dan Kependudukan*. Jakarta: Biro Publikasi CSIS.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Adminstrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, N. (2013). *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.